

BERITA LINGKUNGAN HIDUP

Surat Kabar : **Republika**
Subyek : **Air Tanah**

Edisi : **20 Maret 2009**
Halaman : **25**

Dilema Air Tanah Jakarta

Tarif dinaikkan untuk dalih menjaga kelestarian alam.

Raut muka Gubernur DKI Jakarta, Fauzi Bowo, langsung berkerut. Tak hanya karena mendengar laporan miring, orang nomor satu di Jakarta ini melihat langsung betapa masih banyaknya perusahaan yang menggunakan air bawah tanah secara berlebihan.

Padahal, akibat ulah mereka, permukaan tanah tempat warganya berpijak kian menurun. Ancaman intrusi air laut pun kian menebar di seantero Jakarta. Bukti nyata eksploitasi air tanah secara besar-besaran itu dilihat Fauzi saat berkunjung ke RW 01 Kelurahan Sukabumi Selatan, Kebon Jeruk, Jakarta Barat. Untuk itu, salah satu perusahaan bir di Jl Daan Mogot sudah dihentikan operasionalnya karena boros menggunakan air tanah.

"Untuk mencegah pemanfaatan air tanah secara tak terkendali, kami membuat aturan retribusi dinaikkan enam kali lipat dari yang berlaku sekarang," kata Fauzi, belum lama ini.

Kenaikan retribusi ini akan diajukan ke DPRD untuk disahkan melalui peraturan daerah (perda), jika sebelumnya retribusi air tanah hanya pada kisaran Rp 525, nanti menjadi Rp 3.000 per meter kubik dan akan menjadi Rp 8.000-Rp 20 ribu per meter kubik. Diharapkan sudah berlaku tahun ini.

"Insya Allah anak cucu kita nanti tidak kesulitan air sehingga mereka bisa hidup sejahtera," harap Fauzi.

Seperti juga pengusaha *laundry* di Kelurahan Sukabumi Selatan, tercatat ada 45 lokasi yang semula menggunakan air tanah. Kini, sumber airnya dialihkan menjadi pemakai air bersih dari PAM. "Kami bersyukur para pengusaha sudah ada kesepakatan dengan wali kota," tutur Fauzi.

Kesepakatan Pemprov DKI adalah membuat pengusaha dilarang mengambil air tanah, tapi harus menggunakan air PAM serta memperhatikan instalasi pengolahan air limbah (IPAL).

Kepala Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah (BPLHD) DKI Jakarta, Peni Susanti, malah menilai kenaikan tarif air bawah tanah tersebut harus lebih ditinggikan lagi, yakni hingga 14 kali lipat. Saat ini, besaran tarif yang berlaku Rp 525 per meter kubik-Rp 3.000 per meter kubik menjadi Rp 2.625-Rp 15 ribu per meter kubik. Semestinya, kata dia, tarifnya Rp 8.000 per meter kubik-Rp 20 ribu per meter kubik atau lebih tinggi dari tarif PAM.

Dia menekankan penetapan kenaikan tarif air bawah tanah sangat penting untuk segera diberlakukan, sebagai salah satu upaya Pemprov DKI mencegah pengambilan air tanah secara tidak terkendali di Ibu Kota. Sebab, terutama di kawasan yang sudah dilayani jaringan air minum dari PAM Jaya, volume pengambilan air tanah secara liar masih tinggi dan cenderung naik.

Buktinya, 450 kasus pengambilan air yang tercatat pada 2002 menjadi 1.700 kasus pada 2007.

Pengambilan air tanah secara eksesif dalam lima tahun tersebut telah mengakibatkan permukaan tanah di Jakarta turun hingga 0,5 sentimeter per tahun. Apabila dibiarkan, diperkirakan sampai 2020, Jakarta menghadapi problem banjir permanen yang diakibatkan oleh kenaikan permukaan air laut.

Layanan PAM

Bagi anggota Bidang Teknik Badan Regulator Pelayanan Air Minum (BRPAM) DKI, Firdaus Ali, penetapan tarif pajak air tanah yang lebih tinggi dari air minum yang dipasok PAM Jaya merupakan keharusan. Sebab, pengambilan air tanah secara tidak terkendali dapat berakibat buruk terhadap lingkungan alam, mulai dari kerusakan bagian lapisan bumi, penurunan permukaan tanah, dan berkurangnya persediaan air alam.

"Pengambilan air tanah itu harus dikendalikan. Namun, seiring dengan pengendaliannya melalui penetapan pajak yang lebih mahal itu, Pemprov DKI hendaknya mengusahakan perluasan cakupan layanan air minum di Jakarta," katanya.

Pernyataan Firdaus Ali tak meleset. Sejumlah warga bahkan pengusaha meragukan soal pasokan air bersih dari PAM Jaya, baik secara kuantitas maupun kualitas. Misalnya, Wawan, salah seorang pengelola Bersaudara Laundry di Jl H Soleh 1 No 32, Sukabumi Selatan, Jakbar, mengaku masih menggunakan satu sumur air tanah karena air PAM tidak mencukupi kebutuhan operasional usahanya. "Sekitar pukul 10.00, air PAM sering tidak mengalir," ungkapnyanya.

Boleh jadi, Wawan hanya segelintir dari sekian banyak pengusaha di Jakarta yang terpaksa menggunakan air bawah tanah. Palsalnya, banyak perusahaan swasta lain, seperti usaha restoran, pencucian mobil, bahkan hotel sekalipun menggunakan air bawah tanah.

Sejumlah warga di daerah Manggarai Selatan, Jakarta Selatan, mengalami hal serupa. Beberapa warga mengaku pasokan air terkadang seret bahkan tak mengalir sama sekali terutama di pagi hari. Air kembali mengalir secara normal menjelang siang. "Banyak warga yang menggunakan mesin pompa langsung ke pipa PAM menjadi masalah juga. Sehingga, saat air lagi seret, warga lainnya *enggak* kebagian air," ujar Juned, salah seorang warga di daerah ini.

Selain kuantitas air, kualitas air yang disalurkan melalui PAM pun kerap kotor. Warga menilai, banyaknya kebocoran pipa membuat tanah dan kotoran lain tersalur ke pipa warga sehingga membuat air nyaris tak bisa dikonsumsi.

Kualitas dan kebocoran

Kondisi ini diakui Dirut PT Aetra Air Jakarta, Syahril Japarin. Menurut pimpinan perusahaan yang menjadi mitra PAM Jaya ini, kualitas air baku Ibu Kota yang selama ini dipasok dari Waduk Jatiluhur, Purwakarta, Jawa Barat, melalui saluran Tarum Barat, buruk. Ini lantaran penyaluran melalui saluran secara terbuka sehingga memengaruhi kualitas air minum Jakarta, yang dipasok Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) melalui kedua mitra swastanya, PT Aetra dan PT Palyja.

"Air baku dari Tarum Barat tidak selalu dapat dijamin kualitasnya, karena ada tiga sungai yang melintas," kata Direktur Utama PT Aetra Air Jakarta, Syahril Japarin.

Ia memandang, sudah saatnya Departemen Pekerjaan Umum (PU) memikirkan untuk membuat saluran tertutup, dalam upaya meningkatkan kualitas air minum bagi masyarakat Jakarta.

Sementara Humas PT Palyja, Meyritha, tak menampik masih banyak kebocoran air pada pipa. Itu terjadi lantaran usia pipa yang sudah cukup tua. Kebocoran juga karena adanya pencurian air. Sudah banyak para pelaku kejahatan ini disidangkan di meja hijau.

"Kami sudah upayakan menekan terus tingkat kebocoran tersebut hingga belasan persen, terhitung sejak kami mengelola pelayanan air bersih ini dengan harapan agar jaringan pelayanan bisa diperluas. Sehingga, bisa dinikmati masyarakat sebanyak mungkin, sesuai dengan tema Hari Air Sedunia tahun ini: Berbagi Air, Berbagi Kesempatan," ujarnya. maman sudi Aman

Saatnya Pipa Air Langsung dari Jatiluhur

Sekretaris Komisi D DPRD DKI Jakarta, Fathi R Siddiq, meminta mitra PAM Jaya harus bekerja lebih profesional dan mampu memberikan layanan air bersih bagi warga Jakarta. Sejauh ini, katanya, layanan air bersih belum optimal sehingga memaksa sebagian warga menggunakan air tanah. Padahal, jika hal itu dibiarkan berlarut akan memengaruhi keseimbangan alam. Terlebih swasta yang secara besar-besaran mengeksploitasi air bawah tanah itu. "Kalau pelayanan air bersih optimal, tentunya penggunaan air bawah tanah akan bisa ditekan." ujarnya.

Dia juga sepakat dengan dinaikkannya tarif air bawah tanah. "Selain mampu menghasilkan pendapatan asli daerah (PAD) bagi DKI Jakarta, pemamfaatkan air bawah tanah bisa lebih terkendali. "Yang penting bagaimana pengawasannya bisa dilakukan secara optimal," katanya.

Di sisi lain, anggota Bidang Teknik Badan Regulator Pelayanan Air Minum (BRPAM) DKI Jakarta, Firdaus Ali, menilai, kondisi pelayanan air minum di Jakarta dikaitkan dengan standar pelayanan air bersih, masih jauh dari harapan. Untuk memenuhi kuantitas penyediaan air baku, sudah saatnya dipertimbangkan membangun jaringan pipa langsung dari Bendungan Jatiluhur, Purwakarta, Jawa Barat, sejauh 70 kilometer. Langkah ini dilakukan untuk mengatasi ketersediaan air baku lebih baik dan mengurangi pencemaran. Selama ini, pasokan air baku untuk PAM Jaya yang berasal dari Bendungann Jatiluhur dilakukan melalui jalur terbuka, yakni Kanal Tarum Barat, sehingga rentan tercemar.

"Memang membutuhkan biaya besar untuk pembangunan pipa langsung dengan diameter sangat besar. Namun, itulah salah satu langkah menjawab masalah ketersediaan air baku untuk Jakarta," ujar Firdaus. Dengan terjadinya perubahan iklim dan tata guna lahan pada wilayah tangkapan air di Waduk Jatiluhur, Cirata, dan Saguling, cenderung menimbulkan defisit air baku. Menurutnya, kebutuhan sumber daya air untuk memenuhi warga di wilayah Bogor, Tangerang, Bekasi (Bodetabek) mencapai 728 juta meter kubik per tahun.

Sementara penggunaan air untuk kebutuhan domestik mencapai 511 juta meter kubik per tahunnya dan nondomestik diperkirakan 340 juta meter kubik per tahun. Selain itu, lahan pertanian yang ada di Jakarta pun membutuhkan air dengan jumlah sekitar satu juta meter kubik per tahun.

Ada kecenderungan kebutuhan air terus meningkat setiap tahunnya seiring dengan penambahan jumlah penduduk. Hasil penelitian para pakar yang tergabung dalam Wolrd Water Forum II di Den Haag, Belanda, memperkirakan, Indonesia menjadi salah satu negara yang akan mengalami krisis air pada 2025.

"Karena itu, pemanfaatan air tanah dan penggunaan air bersih harus dilakukan sehemat mungkin," ujar Firdaus. man